

**KONSOLIDASI DEMOKRASI ASIA:
SEBUAH TES MODEL EKONOMI POLITIK**

***ASIA'S DEMOCRATIC CONSOLIDATION: A TEST OF
POLITICAL ECONOMIC MODEL***

Saiful Mujani

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah, Jakarta

Email: sm@saifulmujani.com

Diterima: 3 Oktober 2016; direvisi: 25 Oktober 2016; disetujui: 6 Desember 2016

Abstract

Asia is the continent which its countries have diverse level of democratic consolidation. This paper intends to test how realistic the political-economic model to explain the democratic consolidation in a number of Asian countries. This study rests on the attitude of individual citizens who are observed through nationwide public opinion surveys in each country that became a case in this study, namely Japan, South Korea, Taiwan, Mongolia, Indonesia, the Philippines, and Malaysia. This study concluded several things. First, majority of public in those seven countries have a preference for democracy compared to other regimes, but there are variations in their democratic consolidation level. Second, the evaluation of the economic conditions affect the evaluation of government performance, which in turn affect the evaluation of the performance of democracy, and at the end affect to the democratic consolidation. Third, the political-economic model could not explain the democratic consolidation of democrac in the Philippines and Mongolia, so it needs further study for the two cases. Fourth, the effect of political-economic factors on the democratic consolidation in general consistently separated from variations in political culture, especially the background of tradition or civilization of a nation such as religion, as well as socio-economic diversity such as education.

Keywords: Asia, democratic consolidation, political-economic model, public opinion survey.

Abstrak

Asia merupakan benua di mana negara-negaranya memiliki tingkat konsolidasi dalam demokrasi yang beragam. Tulisan ini bermaksud untuk menguji seberapa realistis model ekonomi-politik untuk menjelaskan konsolidasi demokrasi di sejumlah demokrasi Asia. Studi ini bertumpu pada sikap individu warga yang diobservasi lewat survei opini publik nasional di masing-masing negara yang menjadi kasus studi ini, yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, secara umum masyarakat di ketujuh negara tersebut mayoritas punya preferensi terhadap demokrasi dibanding terhadap rezim lainnya, tetapi ada variasi konsolidasi demokrasi di ketujuh negara tersebut. *Kedua*, Evaluasi atas kondisi ekonomi berpengaruh terhadap evaluasi atas kinerja pemerintah, yang pada gilirannya berpengaruh pada evaluasi atas kinerja demokrasi, dan ujungnya berpengaruh pada konsolidasi demokrasi. *Ketiga*, model ekonomi-politik tidak dapat membantu untuk menjelaskan konsolidasi demokrasi di Filipina dan Mongolia, sehingga perlu telaah lebih lanjut untuk dua kasus tersebut. *Keempat*, efek faktor ekonomi-politik terhadap konsolidasi demokrasi ini secara umum konsisten lepas dari variasi budaya politik, terutama latar belakang tradisi atau peradaban suatu bangsa seperti agama, maupun keragaman sosial-ekonomi seperti pendidikan.

Kata kunci: Asia, konsolidasi demokrasi, model ekonomi-politik, survei opini publik.

Pendahuluan

Asia merupakan benua yang tipe Rezimnya masih cukup beragam. Cukup berbeda dibandingkan dengan Eropa Barat, Amerika Utara, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Di Asia, beberapa negara sudah menganut sistem demokrasi dan masih banyak pula yang menganut otokrasi seperti Korea Utara, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura. Tingkat konsolidasi dalam demokrasi masing-masing negara pun masih beragam.

Kalau menggunakan penilaian kebebasan oleh Freedom House sebagai indikator dari demokrasi dan konsolidasinya, negara-negara di Asia yang paling bebas, baik yang berkaitan dengan hak-hak politik maupun kebebasan sipil, masih sedikit, yakni Jepang, Korea

Utara, dan Taiwan.¹ Belakangan, India menunjukkan kemajuan berarti hingga statusnya naik dari "setengah bebas" menjadi "bebas penuh." Demikian juga Mongolia. Sebaliknya, kemunduran demokrasi paling tajam dialami Thailand. Sebelumnya negara ini sempat dinilai "setengah bebas", sekarang dinilai "tidak bebas" lagi.²

Filipina adalah potret demokrasi lain di Asia. Sejak jatuhnya rezim otoritarian Marcos, Filipina belum mengalami kemajuan demokrasinya. Demikian juga Malaysia. Negara ini secara teratur menyelenggarakan pemilu yang dinilai

¹ Laporan tahunan tentang kebebasan di seluruh dunia oleh Freedom House bisa diakses di https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2016.pdf tidak ada tanggal akses

² Ibid

cukup demokratis, tapi sampai hari ini demokrasi di Malaysia masih belum terkonsolidasi, terutama berkaitan dengan kebebasan sipil, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan press.³

Indonesia memberi gambaran berbeda. Demokrasi Indonesia lebih muda dari demokrasi-demokrasi lainnya di Asia seperti India, Filipina, Malaysia, dan Thailand, tapi cenderung lebih stabil dan semakin terkonsolidasi. Bahkan kalau menggunakan indikator Freedom House, Indonesia pernah menjadi negara yang bebas penuh, hampir mendekati tingkat kebebasan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.⁴ Namun demikian dalam 5 tahun terakhir demokrasi Indonesia sedikit menurun terutama karena komponen kebebasan sipil yang menurun, dari sebelumnya ”bebas penuh” menjadi ”setengah bebas”. Sementara dalam pemenuhan hak-hak politik, sejak 15 tahun lalu sampai saat ini Indonesia dinilai ”bebas penuh” mendekati negara-negara yang demokrasinya sudah terkonsolidasi di Asia.⁵

Demokrasi baru di Asia yang terlihat mengalami kemajuan pesat sejauh ini adalah Mongolia. Negeri kecil ini sekarang dinilai sebagai demokrasi baru yang tingkat kebebasannya masuk dalam kategori ”bebas penuh”, hampir mirip dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara Myanmar yang

baru saja menyelenggarakan pemilihan umum yang dinilai cukup demokratis masih terlalu dini untuk dinilai ”setengah bebas” sekalipun.⁶

Di Asia terlihat variasi konsolidasi demokrasi, dari yang paling kurang terkonsolidasi seperti Thailand hingga yang paling terkonsolidasi seperti Jepang. Salah satu model yang dipercaya bisa menjelaskan variasi konsolidasi demokrasi adalah model ekonomi politik. Tulisan ini merupakan hasil tes sejauh mana model ekonomi politik bisa menjelaskan konsolidasi demokrasi Asia.

Sosial-Ekonomi dan Ekonomi Politik

Model Modernisasi politik mengklaim bahwa demokrasi berkaitan dengan perkembangan sosial-ekonomi sebuah negara. Eksemplar terbaik model ini adalah karya Lipset,⁷ Bollen dan Jackman.⁸ Semakin berkembang sosial-ekonomi sebuah negara maka semakin maju demokrasinya. Negara-negara demokrasi maju seperti di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang dipercaya berhubungan dengan kemajuan sosial ekonomi negara-negara tersebut. Studi lebih belakangan, dengan kasus yang lebih ekstensif, menunjukkan bahwa

³ Ibid

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid

⁷ Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.” *The American Political Science Review* Vol. 53/1, (1959), hlm. 69-105.

⁸ Kenneth A Bollen, dan Robert W. Jackman, “Economic and Non economic Determinants of Political Democracy in the 1960s.” *Research in Political Sociology*. I., (1985).

faktor sosial-ekonomi berhubungan dengan stabilitas demokrasi (*democratic stability*), bukan dengan kemunculan demokrasi (*democratic emergence*).⁹

Model modernisasi tersebut tidak menunjukkan secara eksplisit sejauh mana demokrasi terkonsolidasi karena demokrasi memberi insentif terhadap warga, secara individual maupun kolektif. Pertanyaan ini menjadi penting karena cukup banyak kasus yang menunjukkan perkembangan sosial-ekonomi tidak menghasilkan demokrasi, dan apalagi membuat demokrasiya terkonsolidasi. Singapura, dan negara-negara teluk di Timur Tengah misalnya sampai hari ini belum menjadi demokrasi padahal secara sosial-ekonomi mereka sangat maju dibandingkan banyak demokrasi baru di dunia seperti India, Indonesia, Filipina, Mongolia, sejumlah negara di Afrika, dan negara-negara Amerika Latin.

Negara-negara seperti Singapura dan negara-negara Arab tersebut tidak menjadi demokrasi mungkin karena rezim non-demokrasi mereka memberikan insentif terhadap kehidupan mereka. Tanpa demokrasi mereka bisa sejahtera secara sosial ekonomi.

Model ekonomi politik pada intinya meyakini bahwa dukungan terhadap rezim, sistem politik, atau *polity*, akan terjadi bila rezim tersebut memberikan insentif, terutama insentif ekonomi, terhadap warganya, apapun rezim itu,

⁹ Adam Przeworski, , Michael E. Alvarez, Jose Antonia Cheibub, dan Fernando Limongi. *Democracy and Development. Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990*. (New York: Cambridge University Press, 2000).

demokrasi maupun bukan demokrasi¹⁰ (Finke, Muller dan Seligson 1987). Dukungan terhadap demokrasi, sebagai sebuah sistem politik, akan tumbuh dan semakin kuat bila warga dalam sebuah demokrasi menilai kinerja demokrasi tersebut secara umum baik, dan kinerja demokrasi dinilai baik bila pelaksanaan pemerintahan dalam demokrasi tersebut juga dinilai baik, dan kinerja pemerintahan dinilai baik bila keadaan ekonomi warga atau negara juga dinilai baik. Kata Clarke et al, "*public support for...polity and society more generally, are driven by reactions to the performance of national economies and judgments concerning governments' effectiveness in managing them.*"¹¹

Lebih jauh Clarke et al berargumen:

"...variations in macroeconomic conditions may influence levels of citizen support not only for incumbent governments, but also for a country's political and social arrangements. The potential for such influences is enhanced because beliefs about government's responsibility for the economy reinforce and are, in turn, reinforced by a strand in democratic theory which holds that governmental and social arrangements have contingent legitimacy, depending upon their efficacy in meeting public needs and demands... In this regard, it commonly is hypothesized -- depending on the intensity of economic problems and

¹⁰ Ian McAllister, "The Economic Performance of Governments." *Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance*." Disunting oleh Pippa Norris. (Oxford: Oxford University Press, 1999).

¹¹ Harold D Clarke,., Nitish Dutt, dan Allan Kornberg, "The Political Economy of the Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies." *Journal of Politics* Vol. 55/4, 1993, hlm. 998-1021.

the extent to which they diminish citizens' satisfaction with their lives -- that economic discontent gives rise to calls for political and social change. Should economic well-being decline sharply, people's faith in the ability of an ongoing political system to meet their aspirations will be eroded, and demands for radical restructuring of the polity and society will escalate."¹²

Dengan kata lain, otokrasi pun bisa diterima dan menjadi stabil bila otokrasi tersebut memberikan insentif ekonomi bagi rakyat. Sebaliknya, demokrasi tidak akan mudah diterima dan apalagi menjadi terkonsolidasi bila dalam praktiknya tidak membuat rakyat lebih sejahtera.

Sebuah rezim akan didukung kalau ia membuat rakyatnya sejahtera, dan sebaliknya akan ditolak bila membuat rakyatnya sengsara. Bila keadaan ekonomi di sebuah negara dinilai buruk maka yang pertama disalahkan atau dinilai paling bertanggung jawab adalah pemerintah sehingga pemerintah dinilai buruk kinerjanya, dan pada gilirannya kinerja demokrasi sebagai sebuah sistem di mana pemerintahan bekerja juga akan dinilai buruk, dan akhirnya dukungan terhadap demokrasi sebagai satu tipe rezim atau sistem politik akan luntur.¹³

Demikianlah rangkaian argumen ekonomi politik tentang konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi terjadi ketika demokrasi dirasakan berguna bagi kehidupan sosial-ekonomi warga. Dengan kata lain, warga atau bangsa dalam sistem demokrasi akan semakin mendukung demokrasi hingga demokrasi makin kuat,

makin terkonsolidasi, kalau ternyata demokrasi menciptakan kesejahteraan bagi warga.

Konsep dan Pengukuran

Konsep-konsep pokok dalam model ekonomi politik konsolidasi demokrasi dalam studi ini adalah "konsolidasi demokrasi" itu sendiri, "kinerja demokrasi," "kinerja pemerintah," dan "kondisi ekonomi warga dan negara."

Sampai sekarang konsep "konsolidasi demokrasi" masih terus diperdebatkan di kalangan ahli demokrasi. Salah satu definisi operasional yang sering dikutip tentang konsolidasi demokrasi adalah yang dikemukakan Linz dan Stepan. Kata keduanya, sebuah demokrasi terkonsolidasi bila: 1) secara perilaku, tidak ada kelompok dalam masyarakat yang secara sungguh-sungguh ingin mengganti demokrasi; 2) secara sikap, kebanyakan warga menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik; dan 3) secara konstitusional, bila semua institusi atau organ negara bekerja sesuai dengan konstitusi demokrasi.¹⁴

"Secara sikap, kebanyakan warga menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik" merupakan satu aspek bahwa sebuah demokrasi terkonsolidasi. Tentu saja, ini hanya satu aspek, dan untuk telaah lebih komprehensif dibutuhkan penilaian dari dua aspek lainnya yang dikemukakan Linz dan Stepan tersebut. Atas dasar

¹² Ibid, hlm 100-101.

¹³ Ibid.

¹⁴ Juan J Linz, dan Alfred Stepan.. *The Problem of Democratic Transitions and Consolidations. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe.* (Baltimore: Johns Hopkins University Press,1996).

ketersediaan data, konsolidasi demokrasi dalam studi ini terbatas pada aspek sikap warga terhadap demokrasi (*attitudes*) tersebut. Secara lebih spesifik, aspek ini dalam survei opini publik sering dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel, yang intinya ingin mengukur tingkat penerimaan, preferensi, keinginan, atau dukungan pada demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan.¹⁵

Dalam studi sikap terhadap sistem politik, termasuk sikap terhadap demokrasi, praktik atau kinerja demokrasi biasa dipahami dari banyak gejala, dan dalam survei opini publik yang biasa digunakan untuk studi tentang sikap, biasa bersandar pada serangkaian pertanyaan untuk mencermati gejala-gejala kinerja demokrasi tersebut, yang dibedakan dari sikap mendukung demokrasi seperti yang telah dikemukakan di atas sebagai ukuran dari konsolidasi. Intinya variabel-variabel yang digunakan adalah untuk mengukur sejauh mana demokrasi telah dipraktikkan secara nyata di sebuah negara, dan seberapa baik praktik itu telah dilakukan.¹⁶

Selanjutnya kinerja demokrasi di atas, menurut model ekonomi-politik, dipengaruhi bagaimana kinerja pemerintah, dalam riset opini publik tentang konsolidasi demokrasi, dapat diukur dari serangkaian pertanyaan untuk mengamati gejala kinerja pemerintahan tersebut. Intinya, seberapa

baik atau buruk pemerintah menjalankan pemerintahannya, seberapa puas atau tidak puas rakyat dengan kinerja tersebut. Ini mencakup banyak sektor yang dinilai strategis dan menjadi perhatian publik.¹⁷

Menurut model ekonomi politik, penilaian atas kinerja pemerintah secara umum banyak dipengaruhi oleh penilaian atas kondisi ekonomi warga (egotropik) maupun negara (sosiotropik). Apakah warga menilai kondisi ekonomi itu baik atau buruk, makin baik atau makin buruk, sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (retrospektif), dan sekarang dibanding tahun-tahun ke depan (prospektif).¹⁸ Bila warga menilai bahwa keadaan ekonomi baik atau lebih baik sekarang atau akan lebih baik ke depan maka warga tersebut akan menilai baik kinerja pemerintah. Sebaliknya, akan menilai buruk pemerintah. Pada gilirannya, akan berdampak pada penilaian atas kinerja demokrasi, dan ujungnya akan berpengaruh pada konsolidasi demokrasi yang diukur dari sikap mendukung demokrasi seperti telah dikemukakan di atas.

Metode, Kasus, dan Data

Studi ini bertumpu pada sikap individu warga yang diobservasi lewat survei opini publik nasional di masing-masing negara yang menjadi kasus studi ini: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Mengapa negara-negara tersebut kasusnya? Studi ini tentang

¹⁵ Secara rinci variable-variabel konsolidasi demokrasi yang dimaksud dan digunakan dalam studi ini lihat Appendix.

¹⁶ Operasionalisasi variabel-variabel itu dalam survei lihat Appendix.

¹⁷ Juga lihat Appendix untuk persisnya.

¹⁸ Lihat Appendix untuk lebih rincinya.

konsolidasi demokrasi. Karena itu yang dipilih adalah negara-negara demokrasi Asia, dan kalau demokrasi secara longgar dipahami dalam kerangka kebebasan politik dan kebebasan sipil sebagaimana dikemukakan Freedom House, maka ketujuh negara tersebut termasuk ke dalamnya, dengan derajat yang bervariasi tentunya. Banyak demokrasi lain di Asia yang tidak diteliti di sini karena perkembangannya terakhir yang menunjukkan demokrasinya gagal, yakni Thailand, dan sejumlah kasus besar lain karena tak tersedia atau penulis tak punya akses datanya, yakni India, Srilangka, dan Nepal. Sisanya, belum demokratis seperti Korea Utara, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Afghanistan, dan Pakistan, atau masih kurang cukup demokratis seperti Singapura, Kamboja, Laos, Bangladesh, dan Myanmar sehingga kurang relevan untuk ditelaah konsolidasi demokrasinya.

Data survei nasional negara-negara yang terpilih dalam studi ini tersedia di Asianbarometer, sebuah lembaga tempat berkumpulnya ilmuwan perbandingan politik yang menggunakan survei opini publik sebagai metode studi mereka.¹⁹ Dalam survei Asianbarometer, masing-masing negara peserta diteliti lewat survei opini publik dengan sampel berskala nasional, dan pada prinsipnya bertumpu pada teknik *probability sampling*. Survei dilakukan dalam waktu berbeda-beda dalam rentang waktu tahun 2000-2008.

Berikut adalah hasil uji model ekonomi politik untuk konsolidasi demokrasi di sejumlah demokrasi Asia

¹⁹ Asianbarometer dapat diakses di www.asianbarometer.org

yang ditelaah di sini. Pertama, akan dikemukakan variasi konsolidasi mereka sebagai *dependen variable*. Kemudian disajikan kinerja demokrasi dan kinerja pemerintah, dan kemudian variasi kondisi ekonominya. Bersamaan dengan itu, diuji seberapa signifikan efek masing-masing faktor itu terhadap konsolidasi demokrasi.

Pada bagian akhir analisis dikemukakan sejauhmana efek tersebut konsisten setelah mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, yakni pendidikan, dan agama. Kedua faktor tersebut secara teoretis dan empiris dipercaya berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi sehingga mungkin saja efek ekonomi politik tersebut menjadi tidak signifikan setelah mempertimbangkan dua faktor tersebut dalam analisis.²⁰

Variasi Konsolidasi

Konsolidasi demokrasi pada tingkat sikap individual di tujuh kasus negara demokrasi Asia secara umum cukup tinggi.²¹ Secara umum, warga di negara-

²⁰ Seymour Martin Lipset, "Some Social Requisites ...", hlm. 69-105. Kenneth A Bollen, dan Robert W. Jackman, "Economic and Non economic ...". Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonia Cheibub, dan Fernando Limongi. "*Democracy and Development...*". Gabriel Almond, dan Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. (Princeton: Princeton University Press, 1963). Ronald Inglehart, "The Renaissance of Political Culture." *The American Political Science Review* Vol. 82/4, 1988, hlm. 1203-1230. Robert D. Putnam, Robert Leonardi, dan Raffaella Y. Nanetti. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. (New Jersey: Princeton University Press, 1994).

²¹ Respon atas ketujuh pertanyaan (lihat appendix) yang merupakan ukuran konsolidasi demokrasi tersebut distandarkan kedalam respon berskala ordinal 1-4, di mana satu sangat negatif, dan 4 sangat positif. Kemudian rrspon dari ke-7 variable itu

negara tersebut lebih menginginkan demokrasi dibanding rezim lainnya. Tidak ada satu kasus pun dari tujuh kasus tersebut yang mayoritas warganya tidak menginginkan demokrasi. Preferensi atas demokrasi dibanding rezim selainnya, rata-rata di atas 60%. (Tabel 1)²²

Kalau dibandingkan, konsolidasi demokrasi di antara ke-7 negara tersebut cukup bervariasi, meskipun semuanya berada di atas 60% sebagai batas paling rendah sebuah demokrasi terkonsolidasi pada tingkat sikap. Konsolidasi demokrasi paling tinggi adalah pada warga Indonesia, yang tak berbeda signifikan dengan warga Jepang, dan Korea Selatan. Kemudian urutan berikutnya ditemukan pada warga Malaysia yang kurang lebih sama dengan pada warga Taiwan. Kemudian pada urutan ketiga adalah pada warga Mongolia, dan urutan terakhir pada warga Filipina. (Tabel 1) Variasi preferensi atas demokrasi tersebut, atau konsolidasi demokrasi, di keempat kelompok negara tersebut - dilihat dari sikap positif warganya pada demokrasi - signifikan secara statistik ($P < .001$).

Variasi yang signifikan terutama antara Indonesia dan Jepang di satu sisi, dan Filipina di sisi yang lain. Indonesia yang merupakan demokrasi baru, dan dalam lima tahun terakhir

dijumlahkan hingga membentuk indeks konsolidasi demokrasi berskala 0-1. Makin mendekati 0, maka konsolidasi makin rendah, dan sebaliknya makin tinggi. Realibility test (Cranbach Alpha) atas indeks itu sebesar .497.

²² Pada Tabel I, skor rata-rata konsolidasi demokrasi disederhanakan ke dalam dua bagian untuk memudahkan dalam penyajian. Bila skor di bawah .60 berarti preferensi pada non-demokrasi, dan di atasnya pada demokrasi.

dinilai mengalami kemunduran dalam demokrasinya kalau menggunakan indeks kebebasan yang dikeluarkan Freedom House, ternyata pada aspek sikap sangat bagus dibanding Filipina. Bahkan dibandingkan dengan Mongolia, yang kebebasannya sekarang – menurut Freedom House - lebih baik dibanding Indonesia.²³ Juga konsolidasi demokrasi pada tingkat sikap di Malaysia ternyata lebih baik dari Filipina padahal menurut Freedom House kebebasan di Malaysia lebih rendah dibanding di Filipina.²⁴

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Preferensi atas Rezim di Sejumlah Demokrasi Asia

Tipe rezim	Non-demokrasi	Demokrasi	N
Negara			
Indonesia	9.4%	90.6%	1598
Jepang	10.0%	90.0%	1067
Korea Selatan	12.7%	87.3%	1212
Malaysia	15.4%	84.6%	1218
Taiwan	18.0%	82.0%	1587
Mongolia	27.2%	72.8%	1211
Filipina	38.5%	61.5%	1200

Statistik χ^2 : value/df/sig.: 552.736/6/.000

Apakah model ekonomi politik dapat menjelaskan perbedaan tersebut? Sejauh mana kinerja atau praktik demokrasi berpengaruh terhadap sikap atas demokrasi itu sendiri? Untuk menjawab itu berikut disajikan terlebih

²³ Lihat Freedom House: Loc. Cit.

²⁴ Perbedaan skor konsolidasi demokrasi pada tingkat sikap dengan penilaian Freedom House sangat bisa terjadi karena aspek yang diukur dan cara pengukurannya berbeda. Freedom bersandar pada rating yang diberikan oleh sejumlah panelis (ahli) atas dasar informasi media dan wawancara dengan elite berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran atas praktik, bukan sikap, kebebasan politik maupun kebebasan civil (civil liberty). Survey opini publik di sini hanya berkaitan dengan sikap yang dirasakan oleh warga umumnya.

dahulu bagaimana kinerja demokrasi itu sendiri.

Kinerja Demokrasi

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian awal studi ini, model ekonomi politik pada dasarnya mengklaim bahwa konsolidasi demokrasi ditentukan oleh kinerja atau pelaksanaan demokrasi itu sendiri, dan kinerja ini ditentukan oleh kinerja pemerintah dalam sistem demokrasi, dan penilaian atas kinerja pemerintahan tersebut ditentukan oleh penilaian atas kondisi ekonomi pada tingkat individu maupun negara.

Kinerja demokrasi di negara-negara yang ditelaah di sini dengan indikator-indikator yang telah dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut.²⁵

Secara umum, kinerja demokrasi di tujuh demokrasi Asia menurut penilaian warga mereka masing-masing adalah sedang. Rata-ratanya (*mean score*) 0.65 dalam skala 0.0-1.0. Kinerja demokrasi ini juga cukup bervariasi antara negara, dan variasi ini signifikan secara statistik ($P < .001$).

Di antara ketujuh negara tersebut, penilaian warga atas kinerja demokrasi diberikan tertinggi oleh warga Indonesia (.71) dan Malaysia (.68), dan terendah diberikan oleh warga Korea Selatan (.61) dan Jepang (.62). Perbedaan penilaian tersebut, antara di Indonesia dan Malaysia

²⁵ Kinerja demokrasi dalam studi ini adalah sebuah indeks berskala 0-1 yang dikonstruksi dari 12 variabel yang telah dikemukakan (lihat appendix). Semua variabel saling berkorelasi secara signifikan, dan realibility test (Cronbach alpha) menunjukkan bahwa indeks tersebut reliabel (.78).

dan Korea Selatan atau Jepang sangat menarik. Ini semacam *counter-intuitive* karena para pengamat demokrasi di Asia ataupun dunia pada umumnya menilai bahwa kinerja demokrasi Korea Selatan dan Indonesia sangat berbeda, dalam arti bahwa di Korea Selatan kinerja demokrasinya lebih baik dibanding dengan kinerja demokrasi di Indonesia atau Malaysia.

Apakah perbedaan itu mencerminkan perbedaan kecenderungan di kedua masyarakat tersebut, di mana masyarakat Jepang atau Korea Selatan cenderung lebih menuntut ketimbang masyarakat Indonesia atau negara-negara demokrasi baru lainnya atas kinerja demokrasi mereka? Salah satu kemungkinannya adalah bahwa masyarakat Jepang dan Korea Selatan lebih kritis, mencerminkan apa yang disebut sebagai *critical citizen syndrom*, dibanding masyarakat Indonesia dan Malaysia terhadap kinerja demokrasi di negara mereka masing-masing.²⁶

Yang menjadi perhatian utama studi ini adalah sejauh mana penilaian atas kinerja demokrasi di negara-negara tersebut berhubungan dengan sikap terhadap demokrasi (konsolidasi demokrasi) mereka. Tabel 5 menunjukkan bahwa kinerja demokrasi secara umum berhubungan positif dan signifikan dengan sikap atas atau konsolidasi demokrasi. Dengan kata lain, semakin baik kinerja demokrasi maka demokrasi semakin terkonsolidasi, dan demikian juga sebaliknya.

²⁶ Pippa Norris, *Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance*. (Oxford: Oxford University Press, 1999).

Namun demikian, ketika secara lebih spesifik telaah per negara dilakukan, hubungan tersebut bervariasi. Sejumlah negara menunjukkan bahwa kinerja dan konsolidasi demokrasi berhubungan positif dan signifikan, dan di sejumlah negara selebihnya hubungan tersebut tidak signifikan. (Tabel 5). Di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia, kinerja demokrasi berkaitan signifikan dan positif dengan konsolidasi demokrasi. Sementara di negara-negara selainnya hubungan tersebut tidak signifikan. Perlu analisis tersendiri mengapa perbedaan itu terjadi.

Tabel 2. Kinerja Demokrasi di Sejumlah Demokrasi Asia

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Minimum	Maximum
Indonesia	1012	.7109	.07118	.00224	.46	.95
Malaysia	843	.6770	.12017	.00414	.29	.98
Mongolia	926	.6372	.09763	.00321	.32	.89
Taiwan	1138	.6302	.09593	.00284	.27	.91
Filipina	885	.6244	.08803	.00296	.34	.88
Jepang	702	.6226	.09561	.00361	.30	.91
Korea	810	.6119	.08149	.00286	.36	.80
Total	6316	.6464	.09937	.00125	.27	.98

Statistik (Anova): F/Sig. = 136.568/000

Kinerja Pemerintah

Seperti telah dikemukakan di awal, model ekonomi politik menunjukkan bahwa kinerja demokrasi berkaitan dengan kinerja pemerintah. Semakin positif penilaian atas kinerja pemerintah maka semakin positif juga penilaian atas kinerja demokrasi. Sebaliknya, bila kinerja pemerintah buruk maka kinerja demokrasi juga akan terkena dampak negatifnya hingga kinerja demokrasi juga dinilai buruk. Dalam studi ini, kinerja pemerintah adalah evaluasi warga atas kinerja pemerintah dalam berbagai bidang, terutama berkaitan dengan

keperluan dasar warga, dan berbagai isu yang dinilai menjadi perhatian publik.²⁷

Secara umum, kinerja pemerintah di ketujuh demokrasi Asia yang dianalisis di sini dapat dikatakan sedang, dengan skor rata-rata 0.64 dalam skala 0-1. (Tabel 3).²⁸ Namun demikian, ada variasi yang signifikan kalau dibandingkan antara negara. Kinerja pemerintah Malaysia dibanding pemerintah Korea Selatan, dan bahkan dibandingkan dengan pemerintahan Jepang, misalnya, ternyata lebih baik menurut penilaian warga mereka masing-masing. Setelah Malaysia, Indonesia juga lebih baik.

Perbedaan penilaian warga ini kemungkinan karena di Jepang dan Korea Selatan warganya lebih menuntut dan lebih kritis terhadap kinerja pemerintah dibanding dengan di Malaysia atau Indonesia sebagai cerminan dari *critical citizens syndrome* seperti telah dikemukakan di atas. Apakah variasi ini menghasilkan variasi secara signifikan atas kinerja demokrasi.

Tabel 5 menunjukkan, secara umum kinerja pemerintah berkorelasi sangat signifikan dan positif dengan kinerja demokrasi ($r = .65, P < .01$). Model ekonomi politik secara empirik sangat meyakinkan bahwa kinerja demokrasi berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam sistem demokrasi tersebut.

²⁷ Lihat appendix tentang indikator-indikator kinerja pemerintah ini.

²⁸ Kinerja pemerintah adalah indeks yang dikonstruksi dari indikator-indikator dalam appendix. Indeks berskala 0-1, yang menunjukkan semakin mendekati 0 semakin buruk, dan semakin mendekati 1 semakin baik kinerja pemerintah tersebut. Reliability test atas indeks ini (Cranbach Alpha) 0.733

Tabel 3. Kinerja Pemerintah di Sejumlah Demokrasi Asia

Statistik						
Negara	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Minimum	Maximum
Malaysia	1010	.7200	.11747	.00370	.29	1.00
Indonesia	1252	.6946	.10079	.00285	.39	1.00
Jepang	865	.6380	.09408	.00320	.32	.89
Filipina	1028	.6316	.11375	.00355	.29	.96
Mongolia	1014	.6054	.10738	.00337	.29	.93
Taiwan	1228	.6051	.10342	.00295	.32	.96
Korea	965	.5713	.09434	.00304	.25	.82
Total	7362	.6393	.11566	.00135	.25	1.00

Statistik (ANOVA): F/Sig. = 265.351/.000

Kondisi Ekonomi

Model ekonomi politik untuk menjelaskan konsolidasi demokrasi meyakini bahwa evaluasi atas kondisi ekonomi merupakan dasar dari evaluasi atas kinerja pemerintah, kinerja demokrasi, kemudian berujung pada konsolidasi demokrasi pada tingkat sikap. Sebelum menguji pola tersebut berikut adalah evaluasi atas kondisi ekonomi secara umum dan di masing-masing negara.

Respon positif atas kondisi ekonomi, keadaan ekonomi negara dan rumah tangga baik atau lebih baik, diyakini akan berdampak positif pula pada evaluasi atas kinerja pemerintah, kinerja demokrasi, dan kemudian konsolidasi demokrasi. Tabel 4 adalah statistik tentang evaluasi ekonomi negara dan keluarga.²⁹

Secara umum di 7 demokrasi Asia warganya menilai bahwa kondisi ekonomi “sedang”, yakni 0.60 dalam skala 0.0 -1.0. Namun demikian ada

²⁹ Keenam variable kondisi ekonomi tersebut masing-masing berskala ordinal, 1-5, di mana 1 paling negatif, dan 5 paling positif. Meskipun masing-masing punya arti berbeda, tapi untuk menyederhanakan analisis keenamnya digabungkan hingga membentuk faktor kondisi ekonomi. Skor keenam variabel tersebut dijumlahkan hingga membentuk indeks berskala 0-1. Realibility test menunjukkan (Cranbach Alpha) 0.785.

perbedaan signifikan bagaimana warga menilai kondisi ekonomi mereka. Warga Malaysia paling positif dalam menilai kondisi ekonomi mereka (0.72), kemudian diikuti Mongolia (0.69), dan Indonesia (0.64). Sementara yang paling rendah nilai evaluasinya diberikan oleh warga Korea Selatan (0.49) dan warga Jepang (0.56). (Tabel 4).

Perbedaan evaluasi publik tersebut tidak terlalu mengherankan karena evaluasi terutama berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi beberapa tahun terakhir (retrospektif) dan beberapa tahun ke depan (prospektif). Di negara-negara yang ekonominya maju seperti Jepang dan Korea Selatan keadaan ekonomi negara-negara tersebut relatif lebih stabil ketika survei dilakukan, artinya tidak banyak perubahan, sedangkan untuk negara-negara seperti Malaysia dan Mongolia nampaknya cukup banyak perubahan, dan perubahan itu cenderung positif.

Tabel 4. Kondisi Ekonomi Negara dan Keluarga di Sejumlah Demokrasi Asia

Statistik						
Negara	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Minimum	Maximum
Malaysia	1006	.7159	.12331	.00389	.27	1.00
Mongolia	1166	.6863	.09048	.00265	.20	1.00
Indonesia	1365	.6429	.11299	.00306	.30	.93
Filipina	1002	.5874	.14618	.00462	.20	.97
Taiwan	1288	.5610	.11910	.00332	.20	1.00
Japan	941	.5572	.11069	.00361	.20	.87
Korea	1125	.4894	.11775	.00351	.20	1.00
Semua	7893	.6061	.13832	.00156	.20	1.00

Statistik (ANOVA): F/Sig. = 506.724/.000

Efek Ekonomi Politik

Seperti telah dikemukakan dari awal, evaluasi atas kondisi ekonomi akan punya efek terhadap evaluasi atas kinerja pemerintah yang sedang berjalan, yang pada gilirannya akan punya efek pada

evaluasi atas kinerja demokrasi, dan kemudian berpengaruh terhadap sikap atas demokrasi yang merupakan satu ukuran untuk konsolidasi demokrasi.

Statistik korelasi antara keempat komponen dalam model ekonomi politik untuk menjelaskan konsolidasi demokrasi secara umum mengkonfirmasi argumen ekonomi politik tersebut. (Tabel 5). Secara umum, evaluasi atas kondisi ekonomi berkorelasi positif dan signifikan dengan evaluasi atas kinerja pemerintah, kinerja demokrasi, maupun dengan konsolidasi demokrasi secara langsung.

Model ekonomi politik secara umum membantu menjelaskan konsolidasi demokrasi. Pertanyaannya, sejauh mana model ini tetap bertahan ketika faktor-faktor “budaya politik” dan sosial-ekonomi dipertimbangkan secara bersama-sama untuk menjelaskan konsolidasi tersebut? Mengenai ini akan ditelaah di bawah.

Sebelumnya, perlu dikemukakan di sini, ada perbedaan penting bagaimana model ekonomi politik bekerja di masing-masing kasus yang ditelaah di sini. Korelasi paling konsisten antara komponen-komponen dalam model ekonomi politik terlihat dalam kasus Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia. Kondisi ekonomi, bukan hanya kinerja demokrasi dan kinerja pemerintah, punya korelasi signifikan dengan konsolidasi demokrasi di negara-negara tersebut tersebut.

Sementara itu, dalam kasus Malaysia, kinerja demokrasi tidak mempengaruhi konsolidasi demokrasi.

Yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi di negara tersebut adalah kinerja pemerintah, dan kinerja pemerintah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara tersebut.

Model ekonomi politik nampaknya kurang membantu untuk menjelaskan konsolidasi demokrasi dalam kasus Filipina dan Mongolia. Di Filipina, konsolidasi demokrasi tidak terpengaruh oleh kinerja demokrasi maupun kinerja pemerintah. Bahkan di negara tersebut, kondisi ekonomi berpengaruh negatif terhadap konsolidasi demokrasi (Tabel 5). Penilaian positif atas kondisi ekonomi justru berdampak negatif terhadap konsolidasi demokrasi. Fakta ini “*counter intuitive*”, menyimpang dari kesederungan umum dari semua negara yang ditelaah di sini. Ini perlu analisis lebih jauh secara tersendiri.

Di samping itu, di Mongolia juga terlihat anomali dari argumen ekonomi-politik tersebut. Kondisi ekonomi tak berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi, tapi kinerja demokrasi dan kinerja pemerintah berpengaruh signifikan secara negatif. Artinya, di negara tersebut, warga yang kecewa dengan kinerja demokrasi dan kinerja pemerintah cenderung lebih kuat bagi konsolidasi demokrasi di negeri tersebut. Ini juga kasus yang perlu telaah lebih jauh karena menyimpang dari gejala umum model ekonomi politik.

Tapi lepas dari kasus Filipina dan Mongolia tersebut, model ekonomi politik secara umum membantu menjelaskan konsolidasi demokrasi Asia. Kecenderungan ini tentu mengabaikan

Tabel 5. Korelasi Pearson Faktor Ekonomi Politik dan Konsolidasi Demokrasi Beberapa Kasus Asia

Negara	Faktor ekonomi-Politik	Kinerja Pemerintah	Kinerja demokrasi	Konsolidasi demokrasi
Semua	Kondisi ekonomi	.450**	.371**	0.038**
	Kinerja pemerintah	-	.659**	.121**
	Kinerja demokrasi	-	-	.141**
Jepang	Kondisi ekonomi	.317**	.315**	.154**
	Kinerja pemerintah	-	.696**	.153**
	Kinerja demokrasi	-	-	.228**
Korea Selatan	Kondisi ekonomi	.344**	.191**	.093**
	Kinerja pemerintah	-	.604**	.194**
	Kinerja demokrasi	-	-	.218**
Taiwan	Kondisi ekonomi	.363**	.149**	.179**
	Kinerja pemerintah	-	.692**	.091**
	Kinerja demokrasi	-	-	.195**
Mongolia	Kondisi ekonomi	.417**	.354**	.023
	Kinerja pemerintah	-	.599**	-.067*
	Kinerja demokrasi	-	-	-.085*
Indonesia	Kondisi ekonomi	.333**	.294**	.085**
	Kinerja pemerintah	-	.621**	.120**
	Kinerja demokrasi	-	-	.151**
Filipina	Kondisi ekonomi	.404**	.243**	-.077*
	Kinerja pemerintah	-	.474**	.058
	Kinerja demokrasi	-	-	.036
Malaysia	Kondisi ekonomi	.440**	.375**	.019
	Kinerja pemerintah	-	.739**	.101**
	Kinerja demokrasi	-	-	.041

** dan * masing-masing korelasi secara statistik signifika pada tingkat 0.01 dan .05 (2-tailed).

faktor-faktor lain, misalnya budaya politik padahal sejumlah studi menunjukkan pentingnya budaya politik tersebut bagi konsolidasi demokrasi seperti telah dikemukakan di bagian awal tulisan ini.

Konsistensi Model Ekonomi-Politik

Pertanyaannya kemudian, seberapa konsisten model ekonomi politik ini menjelaskan konsolidasi demokrasi tersebut ketika mempertimbangkan faktor-faktor lain? Analisa statistik multivariate di bawah akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menyertakan agama dan pendidikan sebagai kontrol terhadap faktor-faktor ekonomi politik tersebut. Bila efek ekonomi-politik

tidak menurun secara signifikan setelah dikontrol agama dan pendidikan maka efek ekonomi-politik tersebut konsisten. Mengapa agama dan pendidikan dipertimbangkan untuk mengontrol efek ekonomi politik?

Banyak studi menunjukkan bahwa agama punya pengaruh terhadap demokrasi. Model *civic culture* yang dikemukakan Almond dan Verba³⁰, yang selanjutnya dikembangkan di nataranya oleh Inglehart³¹ dan Putnam³² menunjukkan bahwa tradisi protestan

³⁰ Gabriel Almond, dan Sidney Verba, "The Civic Culture: Political Attitudes...".

³¹ Ronald Inglehart, "The Renaissance of...".

³² Robert D. Putnam, Robert Leonardi, dan Raffaella Y. Nanetti. "Making Democracy Work...".

dibanding tradisi Katolik punya hubungan positif dengan demokrasi. Di samping itu, warga yang kurang taat atau bahkan tidak beragama lebih positif hubungannya dengan civic engagement, dan pada gilirannya berdampak positif terhadap demokrasi ketimbang warga yang religius.³³ Huntington bahkan memperluas efek negatif agama ini dalam skala global. Menurutnya, selain peradaban Barat, terutama peradaban atau tradisi Protestan, peradaban selainnya punya hubungan negatif dengan demokrasi.³⁴

Sementara itu, model modernisasi meyakini bahwa demokrasi ditentukan oleh tingkat pembangunan social-ekonomi, terutama tingkat pendapatan dan pendidikan.³⁵ Pada level individual, karena itu, semakin baik tingkat pendidikan seorang warga maka diharapkan semakin kuat untuk konsolidasi demokrasi.

Dengan efek signifikan dari agama dan pendidikan seperti itu diharapkan efek ekonomi politik menjadi tidak penting karena di balik efek ekonomi politik itu kemungkinan adalah faktor sosial-ekonomi dan agama. Dengan kata lain ekonomi politik kemungkinan bergantung pada faktor sosial-ekonomi dan agama tersebut. Ia bukan faktor

yang independen dalam mempengaruhi konsolidasi demokrasi. Apakah demikian?

Tabel 6 menunjukkan hasil analisis statistik *multivariate* tersebut.³⁶ Faktor ekonomi politik (kondisi ekonomi, kinerja pemerintah, dan kinerja demokrasi) ternyata punya efek positif dan signifikan terhadap konsolidasi demokrasi. Efek ini konsisten lepas dari faktor-faktor lain - agama, pendidikan, dan demografi lainnya seperti perbedaan seks, pendaatan, maupun umur. Dengan kata lain, ekonomi-politik secara umum punya pengaruh independen terhadap konsolidasi demokrasi di sejumlah demokrasi Asia. Pengaruhnya terhadap

³⁶ Dalam analisis *multivariate* (multi-regresi linear) ini, dependent variable adalah konsolidasi demokrasi yang dikonstruksi dari 7 item dilaporkan di Appendix. Karena variasi dari konsolidasi ini tidak normal, sebenarnya regresi linear tidak cocok. Regresi non-linear seperti Logit atau Probit lebih disarankan. Tapi cara membaca logit atau probit kurang sederhana. Dalam studi ini logit dicoba, dan hasilnya kurang lebih sama dengan regresi linear. Karena alasan kemudahan untuk membandingkan efek dari independent variabel terhadap dependent variable (konsolidasi demokrasi) yang disertakan dalam analisis maka studi ini melaporkan hasil regresi linear tersebut. Dalam analisis ini, disertakan faktor seks dan umur. Pendidikan adalah tingkat pendidikan berskala 1-10, dari tidak pernah sekolah formal hingga berpendidikan S-3. Tingkat pendapatan tidak disertakan karena pendapatan berkorelasi sangat signifikan dengan pendidikan. Cukup pendidikan saja untuk menggambarkan efek sosial-ekonomi. Demikian juga jenis pekerjaan, antara kerah putih vs. Kerah biru. Agama adalah indeks yang dikonstruksi dari variabel beragama versus tidak beragama, dan klaim diri seberapa taat terhadap agama (taat vs. Tidak taat). Faktor ekonomi politik, yakni evaluasi atas kondisi ekonomi nasional dan rumah tangga, kinerja pemerintah, dan kinerja demokrasi saling berkorelasi secara kuat, dan analisa faktor menunjukkan ketiganya membentuk satu dimensi, yang di sini disebut sebagai faktor ekonomi-politik. Faktor ini merupakan indeks (*factor scores*) yang dikonstruksi lewat analisis faktor tersebut.

³³ Ibid.

³⁴ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. (New York, NY: Simon and Schuster, 1996).

³⁵ Seymour Martin Lipset, "Some Social Requisites ...", hlm. 69-105. Kenneth A Bollen, dan Robert W. Jackman, "Economic and Non economic ...". Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonia Cheibub, dan Fernando Limongi. "Democracy and Development...".

konsolidasi demokrasi tidak dibentuk oleh faktor pendidikan; juga tidak bisa diperlemah oleh faktor agama. Bila kondisi ekonomi, pelaksanaan pemerintah, dan praktik demokrasi di sebuah negara dinilai positif maka demokrasi di negara tersebut akan semakin terkonsolidasi, dan demikian juga sebaliknya.

Tabel 6. Analisis Multivariate Konsolidasi Demokrasi Sejumlah Demokrasi Asia

Statistik	B	Std. Error	Beta
Parameter			
Konstata	.639***	.015	
Ekonomi-Politik	.034***	.003	.165

R² = .056
N = 4883

*** dan ** pengaruh secara statistic signifikan masing-masing pada P<.001 dan P<.01

Penutup

Tulisan ini bermaksud untuk menguji seberapa realistis model ekonomi-politik untuk menjelaskan konsolidasi demokrasi di sejumlah demokrasi Asia. Satu komponen dari konsolidasi adalah sikap warga yang meyakini bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dibanding sistem politik lainnya.

Dasar argument ekonomi politik adalah bahwa sebuah sistem politik, rezim, atau bahkan secara lebih luas *polity*, keberlangsungannya sangat ditentukan oleh seberapa jauh dalam praktiknya sistem tersebut memberikan insentif terhadap warganya. Demokrasi sebagai sebuah rezim secara lebih khusus memberikan ruang yang lebih besar bagi warga untuk menuntut insentif tersebut bagi hidup mereka karena warga

diberi ruang untuk menuntut kinerja demokrasi oleh badan-badan yang terkait di dalamnya, termasuk pemerintah.

Bila masyarakat merasa tidak mendapatkan keuntungan dari demokrasi, malah sebaliknya penderitaan, maka dukungan terhadap demokrasi sebagai sebuah sistem akan merosot, dan menjadi terbuka bagi masuknya rezim non-demokrasi. Keuntungan yang dimaksud oleh warga adalah terutama kehidupan ekonomi mereka dan ekonomi negara secara umum dirasakan lebih baik di bawah demokrasi tersebut. Bila keadaan ini yang dirasakan maka dukungan terhadap demokrasi atau konsolidasi demokrasi akan semakin kuat, dan demikian juga sebaliknya.

Mekanisme hubungan antara konsolidasi demokrasi dan kondisi ekonomi warga dan negara dalam sebuah sistem ditentukan oleh kinerja demokrasi itu sendiri, dan kemudian oleh kinerja pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah bangsa. Akhirnya kinerja demokrasi dan kinerja pemerintah menentukan kondisi ekonomi tersebut.

Dengan menggunakan data survei opini publik, yang biasa digunakan untuk analisis konsolidasi demokrasi di berbagai demokrasi di dunia, ditemukan dalam kasus-kasus yang ditelaah di sini efek faktor ekonomi-politik tersebut, dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, secara umum masyarakat di ketujuh negara tersebut mayoritas punya preferensi terhadap demokrasi dibanding terhadap rezim lainnya.

Namun demikian ada variasi konsolidasi demokrasi di ketujuh negara tersebut.

Kedua, variasi konsolidasi demokrasi dalam kasus yang ditelaah di sini secara umum terbukti dapat dijelaskan oleh model ekonomi politik. Evaluasi atas kondisi ekonomi berpengaruh terhadap evaluasi atas kinerja pemerintah, yang pada gilirannya berpengaruh pada evaluasi atas kinerja demokrasi, dan ujungnya berpengaruh pada konsolidasi demokrasi. Dengan kata lain, konsolidasi demokrasi akan melemah, dan demokrasi akan terancam perkembangannya dan bahkan keberlangsungannya bila ternyata sistem ini tidak mampu menciptakan kesejahteraan secara ekonomi bagi rakyat.

Ketiga, ketika telaah secara lebih khusus dilakukan pada masing-masing negara, model ekonomi-politik tidak menjelaskan semua kasus. Ia tidak membantu untuk menjelaskan konsolidasi demokrasi di Filipina dan Mongolia. Perlu telaah lebih lanjut untuk dua kasus ini.

Keempat, efek faktor ekonomi-politik terhadap konsolidasi demokrasi ini secara umum konsisten lepas dari variasi budaya politik, terutama latar belakang tradisi atau peradaban suatu bangsa seperti agama, maupun keragaman sosial-ekonomi seperti pendidikan. Dengan kata lain, secara umum, lepas agamanya apa, maupun tingkat pendidikan masyarakat seperti apa, kinerja demokrasi dan pemerintah, dan kondisi ekonomi tetap berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi.●

Daftar Pustaka

Buku

- Almond, Gabriel, dan Sidney Verba.. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- Bollen, Kenneth A., dan Robert W. Jackman.. "Economic and Noneconomic Determinants of Political Democracy in the 1960s." *Research in Political Sociology*. I. 1985.
- Clarke, Harold D., Nitish Dutt, dan Allan Kornberg.. "The Political Economy of the Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies." *Journal of Politics* Vol. 55/4, (1993). hlm.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York, NY: Simon and Schuster. 1996.
- ., "The Clash of Civilizations?". *Foreign Affairs*, Summer, 1993hlm..
- Inglehart, Ronald, "The Renaissance of Political Culture." *The American Political Science Review* Vol. 82/4, 1988.hlm.
- Linz, Juan J., dan Alfred Stepan. *The Problem of Democratic Transitions and Consolidations. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1996.
- Lipset, Seymour Martin. "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." *The American Political Science Review* Vol. 53/1, 1959. hlm. 69-105
- McAllister, Ian. "The Economic Performance of Governments." *Critical Citizens*.

Global Support for Democratic Governance.” Disunting oleh Pippa Norris. Oxford: Oxford University Press, 1999.

MacPherson, C. B. *The Life and Times of Liberal Democracy.* Oxford: Oxford University Press, 1977.

Norris, Pippa. *Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance.* Oxford: Oxford University Press, 1999.

Prezeworski, Adam, Michael E. Alvarez, Jose Antonia Cheibub, dan Fernando Limongi. *Democracy and Development. Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990.* New York: Cambridge University Press, 2000.

Putnam, Robert D., Robert Leonardi, dan Raffaella Y. Nanetti. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.* New Jersey: Princeton University Press, 1994.

Appendiks:

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam survei Asian Barometer:

Konsolidasi Demokrasi:

1. Sejauh mana anda ingin atau tidak ingin agar negara kita demokratis sekarang
2. Sejauh mana menurut anda demokrasi cocok atau tidak cocok untuk negara kita
3. Dari beberapa pernyataan berikut pernyataan mana yang paling dekat dengan pendapat anda sendiri untuk negara kita? Pertama, dalam keadaan tertentu otoritarianisme atau bukan demokrasi bisa diterima; kedua, tidak peduli sisitem manapun, demokrasi ataupun bukan demokrasi sama saja, dan ketiga, selalu lebih ingin sisitem demokrasi Which the following statement is closest to your opinion?

4. Dari dua pernyataan berikut mana yang paling dekat dengan pendapat anda sendiri? Pertama, demokrasi tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi negara kita; atau, kedua, sebaliknya, demokrasi bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi negara kita?
5. Ada yang berpendapat, “tidak perlu Dewan Perwakilan Rakyat, serahkan saja pada satu pemimpin yang kuat untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kepentingan rakyat.” Seberapa setuju atau tidak setuju anda dengan pendapat tersebut?
6. Seberapa setuju atau tidak setuju anda kalau di negara kita hanya ada satu partai yang ikut pemilihan umum dan mengisi jabatan-jabatan negara?
7. Ada yang berpendapat, “tentara yang harus menjalankan pemerintahan negara kita.” Seberapa setuju atau tidak setuju anda dengan pendapat tersebut?

Kinerja Demokrasi:

1. Bagaimana anda menilai kebebasan dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum terakhir di negara kita
2. Menurut anda, sudah seberapa demokratis negara kita sekarang
3. Secara keseluruhan, seberapa puas atau tidak puas anda dengan jalannya demokrasi sejauh ini di negara kita
4. Menurut anda di mana posisi pemerintahan kita sekarang dalam skala 1-10, di mana 1 berarti sama sekali tidak demokratis, dan 10 berarti sepenuhnya sudah demokratis
5. Seberapa setuju atau tidak setuju anda dengan pendapat bahwa sekarang rakyat sudah bebas bicara, tanpa rasa takut, sesuai dengan pikirannya sendiri
6. Partai politik atau calon dalam pemilihan umum punya akses yang setara terhadap media massa selama masa kampanye

7. Seberapa setuju atau tidak setuju anda dengan pendapat bahwa setiap orang sekarang diperlakukan sama oleh pemerintah
8. Ada yang berpendapat, “ketika pemerintah melanggar hukum, sistem hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa.” Seberapa setuju atau tidak setuju anda dengan pendapat tersebut?
9. Seberapa setuju anda dengan pendapat bahwa rakyat sekarang sudah boleh ikut serta organisasi apapun yang mereka suka tanpa rasa takut
10. Seberapa sering pemerintah menahan informasi penting agar tidak diketahui rakyat
11. Sudah seberapa patuh pejabat pemerintah pusat pada hukum?
12. Menurut anda seberapa besar pemilihan umum kita memberi kesempatan warga untuk memilih sesuai keinginannya partai atau calon yang berbeda-beda yang ikut serta dalam pemilihan umum?
13. Sejauhmana menurut anda Dewan Perwakilan rakyat sudah mampu mengawasi pemerintah?
14. Seberapa baik atau tidak baik pemerintah sejauh ini sudah merespon keinginan rakyat?

Kinerja pemerintah:

1. Secara umum, seberapa aman atau tidak aman tinggal di daerah sini sekarang?
2. Seberapa setuju dengan pendapat bahwa sekarang warga umumnya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal
3. Menurut anda bagaimana dengan keadaan politik di negara kita sekarang
4. Seberapa puas atau tidak puas anda sekarang dengan kinerja pemerintah
5. Seberapa menyebar luas korupsi atau suap di pemerintah pusat sekarang?
6. Seberapa menyebar luas korupsi atau suap di pemerintah daerah sekarang?

7. Menurut anda, sudah seberapa banyak pemerintah sekarang melakukan pemberantasan korupsi dan suap?

Kondisi ekonomi:

1. Bagaimana anda menilai kondisi ekonomi negara kita secara umum? Sangat baik, cukup baik, biasa saja, kurang baik, atau tidak baik sama sekali?
2. Bagaimana anda menilai perubahan keadaan ekonomi di negara kita beberapa tahun terakhir, apakah berubah menjadi jauh lebih baik, lebih baik, tidak ada perubahan, lebih buruk, atau jauh lebih buruk?
3. Bagaimana menurut penilaian anda kondisi ekonomi negara kita beberapa tahun ke depan dari sekarang, apakah berubah menjadi jauh lebih baik, lebih baik, tidak ada perubahan, lebih buruk, atau jauh lebih buruk?
4. Bagaimana anda menilai kondisi ekonomi rumah tangga anda sekarang? Sangat baik, cukup baik, biasa saja, kurang baik, atau tidak baik sama sekali?
5. Bagaimana anda menilai perubahan keadaan ekonomi keluarga anda beberapa tahun terakhir, apakah berubah menjadi jauh lebih baik, lebih baik, tidak ada perubahan, lebih buruk, atau jauh lebih buruk?
6. Bagaimana menurut penilaian anda kondisi ekonomi Rumah tangga anda beberapa tahun ke depan dari sekarang, apakah berubah menjadi jauh lebih baik, lebih baik, tidak ada perubahan, lebih buruk, atau jauh lebih buruk?